



ANALISA PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DALAM MENILAI KINERJA KEUANGAN DESA SEBELUM DAN MASA COVID19 DI DESA PEMATANG SERAI

Oktarini Khamilah Siregar¹⁾, Vina Arnita²⁾, dan Yurika Aulia³⁾

¹⁾ Pascasarjana Magiter Ekonomi , Universitas Pembangunan Pancabudi, Indonesia

²⁾ Prodi Akuntansi, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan
Pancabudi, Indonesia

³⁾ Prodi Akuntansi, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan
Pancabudi, Indonesia

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Desa yang tepat sasaran akan membuat optimalisasi dalam menggunakan pembiayaan belanja sehingga pendapatan desa termasuk pendapatan asli desa meningkat di Desa Pematang Serai. Kinerja keuangan desa melalui pendekatan rasio dengan analisis pendapatan desa bahwa pendapatan desa masih sekitar lebih 96% dominan berharap kepada pendapatan transfer pemerintah pusat sehingga desa pematang serai sangat ketergantungan dengan pemerintah pusat dan belum bisa mandiri dan pendapatan desa belum efisien dalam membiayai belanja desa dan belanja desa sebelum dan masa pademik covi19 di Desa pematang serai kurang efisien dengan alokasi belanja desa yang tidak kerah pembangunan desa disebabkan kondisi pademik covid19 yaitu belanja desa lebih konsentrasi dalam biaya perlindungan masyarakat. Perlunya peningkatan pendapatan asli desa dengan melakukan perencanaan dan pengawasan pemungutan retribusi dan pajak desa, pergerakan belanja desa yang berdampak dalam pembangunan investasi baru di desa pematang serai seperti pembangunan wisata desa dengan membantu menghidupkan aktivitas BUMDES dan pelaku UMKM di desa tersebut dan secara prioritas dapat membantu pendapatan asli desa.

Kata Kunci: Pendapatan dan Belanja Desa.

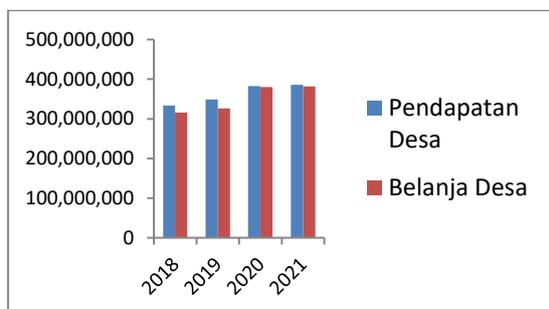
*Correspondence Address : oktarinikhamilah@dosen.pancabudi.ac.id

DOI : 10.31604/jips.v10i2.2023.908-922

© 2023UM-Tapsel Press

PENDAHULUAN

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia adalah pedesaan. Terbentuknya suatu desa yang sejahtera pasti adanya sangkut paut dengan pemerintah daerah yang memiliki wewenang dalam mengatur dan mengelola keuangan secara baik untuk suatu pembangunan yang didukung oleh kemandirian dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan. Desa Pematang Serai berada di Pemerintah Kabupaten Langkat di Kecamatan Tanjung Pura. Desa tersebut merupakan Desa wisata yang terkenal dengan adanya Goel, kenderaan yang digunakan diatas danua buatan masyarakat sekitar. Berikut ini data laporan realisasi pendapatan dan belanja desa pemerinth kabupaten Langkat dari dalam grafik adalah



Gambar 1. Data Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Kabupaten Langkat Periode 2018-2021

Sumber :BPS Provinsi, 2023

Gambar1 menunjukkan pendapatan dan belanja desa selama 4 tahun sebelum masa covid19 dan masa covid19 mengalami peningkatan lebih kurang 2% (periode 2018-2021). Pendapatan Desa terdiri dari Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer dan Pendapatan Lain-lain. Desa dikatakan mandiri apabila memiliki pendapatan asli daerah lebih besar dari pendapatan transfer. Anugeraheni dkk (2022)

menjelaskan desa harus dapat mengoptimalkan pendapatan asli desa dengan cara memaksimalkan pengelolaan sumber pendapatan desa serta menggali dan mengembangkan potensi - potensi yang dimiliki desa guna menambah sumber pendapatan asli desa, sehingga meningkatnya pendapatan asli daerah akan meningkatkan pemungutan PAD menjadi efisien. Martiastuti (2021) menjelaskan peningkatan SDM, transparansi, akuntabilitas serta meningkatkan pengelolaan BUMDes agar dapat memberi pemasukan dalam PADes sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan.

Desa dituntut harus dapat mengoptimalkan pembiayaan belanja desa secara efisien dengan kata lain bahwa desa dalam menggunakan pembiayaan tidak terlalu boros, tetapi pembiayaan itu tepat sasaran agar tujuan dalam meningkatkan pemungutan desa tercapai dan pendapatan desa mengalami peningkatan. Damayanti (2021) mengatakan Dana Desa dengan kategori efektif dapat menjelaskan jika pelayanan yang disediakan, dirasakan dengan baik oleh masyarakat. Salah satu desa agar terhindar dari kesalahan dan pemborosan dalam penggunaan dana desa maka perlu dilakukan efisiensi belanja. Kinerja yang kurang efisien cenderung dikarenakan adanya pemborosan, saat memperhitungkan alokasi keuangan untuk biaya pembangunan dan aktivitas pemerintah desa tidak cermat dalam mengkalkulasi kapasitas keuangan desa serta tingkat prioritas pendanaan, sehingga pencapaian sasaran tidak optimal (Rahmadani, 2019). Kemudian Desa perlu melakukan pengawasan dan pengendalian secara benar dan berkelanjutan agar dalam pengalokasian dana desa ini tepat dan sesuai sasaran yang diharapkan (Martiastuti, 2021). Syah (2021) mengatakan dengan melalui APBDes, kebijakan desa dilaksanakan

dalam berbagai program atau kegiatan karena anggarannya sudah ditentukan. Berdasarkan hasil research gap para peneliti terdahulu membuat peneliti ingin menganalisis rasio keuangan desa dilihat dari analisis pendapatan desa yaitu derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan desa, analisis pertumbuhan pendapatan desa, rasio efisiensi PADesa, Rasio Efektivitas PADesa, Rasio Belanja Desa dan Rasio Belanja Desa Per Bidang serta ingin melihat perbedaan kinerja keuangan desa sebelum dan masa pademik covid19 di Desa Pematang Serai, Kecamatan Tanjung Pura, Pemerintah Kabupaten Langkat sehingga signal aparatur desa dapat dijelaskan dalam laporan keuangan desa.

LANDASAN TEORI

1. Teori Signaling Dalam Pemerintah

Teori signal atau *signaling theory* didasarkan pada asumsi bahwa informasi yang diterima oleh masing-masing pihak tidak sama. Teori ini berkaitan dengan asimetri informasi yang mana menunjukkan adanya asimetri informasi antara manajemen desa dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi. Suripto (2021) "*Signaling theory* adalah sesuatu sikap manajemen perusahaan dalam memberi petunjuk untuk investor terkait pandangan manajemen pada prospek desa dimasa yang akan datang". Untuk itu, perangkat desa perlu memberikan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan melalui penerbitan laporan keuangan daerah. Teori sinyal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah desa memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Digunakan para perangkat desa yang memiliki informasi lebih baik mengenai desanya akan terdorong untuk menyampaikan informasi tersebut kepada calon investor dimana hal tersebut bertujuan agar desa dapat

meningkatkan nilai desanya melalui suatu pelaporan dengan mengirimkan sinyal melalui laporan keuangan daerah.

2. Pendapatan Desa

Pendapatan desa adalah segala jenis pendapatan yang berasal dari sumber-sumber yang dimiliki desa atau sumber-sumber yang berada di bawah pengelolaan desa. Kekayaan desa adalah semua hak desa yang diakui sebagai salah satu sumber pendapatan desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada PSAP Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran, dinyatakan bahwa pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

3. Belanja Desa

Belanja dilingkungan akuntansi pemerintah di Indonesia diartikan sebagai semua pengeluaran bendahara umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah. Irma (2015) menjelaskan Belanja Desa adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum desa yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Desa.

Belanja Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014. Tentang pengelolaan keuangan desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

Makin besar pendapatan desa, maka akan semakin besar pula belanja desa yang bisa digunakan untuk pembangunan desa. Dengan meningkatnya belanja desa pada setiap tahunnya mengakibatkan pembangunan sarana prasarana desa dan dusun pada tahun-tahun yang akan datang juga meningkat secara signifikan (Hoesada, 2014).

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan suatu proses perencanaan keuangan tahunan pemerintah desa yang telah disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Badan Permusyawaratan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan desa meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. APBDesa adalah pertanggungjawaban dan pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang semua aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah desa atas pengelolaan dana keuangan desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Fungsi Anggaran Desa mempunyai fungsi utama yaitu : Alat Perencanaan, Alat Pengendalian, Alat Kebijakan Fiskal, Alat Koordinasi dan Komunikasi , Alat Penilaian Kerja, dan Alat Motivasi

5. Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah

Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud *Pertama*, pengukuran kinerja

sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. *Kedua*, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. *Ketiga*, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Ihyahul Ulum, 2009).

6. Rasio Kinerja Keuangan Desa

Mahmudi (2009) ada beberapa model rasio yang akan mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

a. Derajat Desentralisasi

Rasio ini membandingkan jumlah PADesa dibagi dengan jumlah total pendapatan Desa. Rumus Derajat Desentralisasi = $(\text{Pendapatan Asli Daerah} / \text{Total Pendapatan Desa}) \times 100\%$

b. Rasio Ketergantungan Keuangan Desa

Rasio ini membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan desa dengan total penerimaan desa. Rumus Rasio Ketergantungan keuangan desa = $(\text{Pendapatan Transfer} / \text{Total Pendapatan desa}) \times 100\%$

c. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Desa

Rasio dengan melihat kinerja pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif. Rumus Analisis Pertumbuhan Pendapatan Desa = $\frac{\text{Pendapatan Desa Thn } (t) - \text{Pendapatan Desa Thn } (t-1)}{\text{Pendapatan Desa Thn } (t)}$

d. Rasio Efisiensi PADesa

Rasio dengan membandingkan biaya

belanja dengan Total Pendapatan Asli desa. Rumus Rasio Efisiensi PADesa = (Biaya Belanja / Total Pendapatan Asli desa) x 100 %

e. Rasio Efektivitas PADesa

Rasio dengan membandingkan Realisasi Pendapatan Asli Desa dengan Target Pendapatan Asli Desa. Rumus Rasio Efektivitas PADesa = (Realisasi PADesa / Target PADesa) x 100%

f. Rasio Belanja Desa Per Bidang

Rasio dengan membandingkan realisasi Belanja desa per program dibagi total belanja desa. Rumus Belanja Desa Per Bidang = (Realisasi Belanja Desa Per Bidang / Total Belanja Desa) x 100%

g. Rasio Efisiensi Belanja Desa

Rasio dengan membandingkan realisasi Belanja desa dibagi anggaran belanja desa. Rumus Rasio Efisiensi Belanja Desa = (Realisasi Belanja Desa / Anggaran Belanja Desa) x 100 %

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian adalah deskripsi kuantitatif. Pendekatan dengan ruang lingkup desa pematang serai di Pemerintah kabupaten Langkat untuk menilai kinerja keuangan desa selama tahun 2018 sampai dengan 2021. Tahapan kegiatan penelitian yaitu tahap pendahuluan dilakukan dengan pengumpulan data kemudian diketahui fenomena dalam penelitian, analisis data dengan menganalisis melalui pendekatan rasio keuangan desa, interpretasi data dengan menginterpretasikan hasil nilai-nilai

respons setiap variabel dan membandingkannya dengan teori dan hasil penelitian sebelumnya dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

a. Perhitungan Rasio Keuangan

1. Derajat Desentralisasi

Hasil perhitungan derajat desentralisasi Desa Pematang Serai adalah

Tabel 1 Perhitungan Derajat Desentralisasi

| Tahun | Pendapatan Asli Desa | Pendapatan Desa | Derajat Desentralisasi |
|-------|----------------------|-----------------|------------------------|
| 2018 | 6.500.000 | 1.269.370.000 | 0,512% |
| 2019 | 8.000.000 | 1.347.805.790 | 0,594% |
| 2020 | 7.310.000 | 1.356.783.830 | 0,539% |
| 2021 | 8.180.000 | 1.328.403.885 | 0,616% |

Sumber : Data Diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 1 bahwa perhitungan derajat desentralisasi desa pematang serai dari tahun 2018 sampai 2021 menunjukkan peningkatan yang semakin baik. Meskipun di tahun 2019 derajat desentralisasi sebesar 0.594% menunjukkan peningkatan tetapi 2020 mengalami penurunan akibat kondisi daerah di dunia mengalami wabah covid19 akan tetapi 2021 mengalami peningkatan yang dratis sebesar 0.616%.

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Desa

Hasil Perhitungan rasio ketergantungan keuangan desa adalah

Tabel 2 Perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan

| Tahun | Pendapatan Transfer | Pendapatan Desa | Rasio Ketergantungan Keuangan Desa |
|-------|---------------------|-----------------|------------------------------------|
| 2018 | 1.252.210.000 | 1.269.370.000 | 98,648% |
| 2019 | 1.332.435.000 | 1.347.805.790 | 98,860% |
| 2020 | 1.343.383.000 | 1.356.783.830 | 99,012% |
| 2021 | 1.318.289.600 | 1.328.403.885 | 99,239% |

sumber : Data Diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 2 bahwa perhitungan rasio ketergantungan keuangan desa mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai dengan 2021. Tahun 2021 rasio ketergantungan keuangan desa sebesar 99,239%, menunjukkan desa pematang serai semakin meningkatnya ketergantungan pembiayaan operasional di masa covid19

3. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Desa

Hasil perhitungan analisis pertumbuhan pendapatan desa adalah :

Tabel 3. Perhitungan Analisis Pertumbuhan Pendapatan Desa

| Tahun | Pendapatan Desa | Perhitungan Analisis Pertumbuhan Pendapatan Desa (APPDesa) |
|-------|-----------------|--|
| 2018 | 1.269.370.000 | 0 |
| 2019 | 1.347.805.790 | 0,058% |
| 2020 | 1.356.783.830 | 0,007% |
| 2021 | 1.328.403.885 | - 0,021% |

Sumber : Data Diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 3 perhitungan analisis pertumbuhan pendapatan desa tahun 2020 mengalami sedang peningkatan dengan nilai 0.007 dan tahun 2021 sebesar -0.021 mengalami penurunan.

4. Rasio Efisiensi PADesa

Hasil perhitungan rasio efisiensi pendapatan desa adalah:

Tabel 4 Perhitungan Rasio Efisiensi PADesa

| Tahun | Belanja Desa | Pendapatan Desa | Rasio Efisiensi PADesa | Kriteria |
|-------|---------------|-----------------|------------------------|----------------|
| 2018 | 1.270.440.000 | 1.269.370.000 | 100,084% | Tidak Efisien |
| 2019 | 1.226.833.682 | 1.347.805.790 | 91,025% | Kurang Efisien |
| 2020 | 1.226.833.682 | 1.356.783.830 | 90,422% | Kurang Efisien |
| 2021 | 1.285.152.264 | 1.328.403.885 | 96,744% | Kurang Efisien |

Sumber : Data Diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan rasio efisiensi pendapatan desa mulai tahun 2018 berada diatas 100% yaitu tidak efisien. Meskipun nilai rasio efisiensi pendapatan desa fluktuasi mulai tahun 2019 sebesar 91,025%, kemudian turun di tahun 2020 sebesar 90,422% dan naik kembali sebesar 96,744% dengan kategori kurang efisien.

5. Rasio Efektivitas PADesa

Hasil perhitungan rasio Efektivitas Pendapatan Desa di Desa pematang Serai selama tahun 2018 sampai 2021 adalah

Tabel 5. Perhitungan Rasio Efektivitas PADesa

| Tahun | Realisasi Pendapatan Asli Desa | Target Pendapatan Asli Desa | Rasio Efektivitas PADesa | Kriteria |
|-------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------|
| 2018 | 6.500.000 | 6.500.000 | 100% | Efektif |
| 2019 | 8.000.000 | 8.000.000 | 100% | Efektif |
| 2020 | 7.310.000 | 7.310.000 | 100% | Efektif |
| 2021 | 8.180.000 | 8.180.000 | 100% | Efektif |

Sumber : Data Diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 5 hasil perhitungan rasio efektivitas pendapatan desa selama 4 tahun dari tahun 2018 sampai 2021 berada 100% menunjukkan bahwa efektif pemerintah desa dalam merealisasikan pendapatan desa. Tetapi dilihat tahun 2020 sebesar 7.310.000 realisasi pendapatan asli desa menurun jika dibandingkan tahun 2019

disebabkan tahun tersebut mengalami bencana penyakit /covid19 sehingga target realisasi pendapatan desa tidak tercapai. Kemudian tahun 2021 sebesar 8.180.000 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020, kondisi desa tahun 2021 sudah mulai optimal untuk melaksanakan aktivitas operasional pemerintah desa.

6. Rasio Belanja Desa Per Bidang

Rasio Belanja Desa merupakan perbandingan pengeluaran yang dilakukan desa selama satu periode berdasarkan jenis bidang kegiatan masing-masing. Berikut ini perhitungan rasio belanja desa per bidang adalah

a. Belanja Penyelenggara Pemerintah Desa

Hasil perhitungan Rasio Belanja Desa Per Bidang Belanja Penyelenggara Pemerintah Desa adalah

Tabel 6. Perhitungan Rasio Belanja Desa Per Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa

| Tahun | Belanja Desa | Belanja Penyelenggara Pemerintah Desa | Belanja Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa |
|-------|---------------|---------------------------------------|--|
| 2018 | 1.270.440.000 | 379.139.800 | 335,085% |
| 2019 | 1.226.833.682 | 378.842.182 | 323,838% |
| 2020 | 1.226.833.682 | 519.677.154 | 236,076% |
| 2021 | 1.285.152.264 | 536.407.264 | 239,585% |

Sumber : Data Diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 6 perhitungan Rasio Belanja Desa Per Bidang Belanja Penyelenggara Pemerintah Desa mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai 2021. Dimasa covid 19 rasio belanja desa per bidang belanja penyelenggara pemerintah desa tahun 2020 sebesar 236,076% dan 2021 sebesar 239,585%. Penurunan ini

disebabkan semakin tingginya biaya belanja penyelenggara pemerintah desa tahun 2020 dan 2021.

b. Belanja Pelaksana Pembangunan Desa

Hasil perhitungan Rasio Belanja Desa Per Bidang Belanja Pelaksana Pembangunan Desa adalah

Tabel 7. Perhitungan Rasio Belanja Desa Per Bidang Pelaksana Pembangunan Desa

| Tahun | Belanja Desa | Belanja Pelaksana Pembangunan Desa | Belanja Bidang Pelaksana Pembangunan Desa |
|-------|---------------|------------------------------------|---|
| 2018 | 1.270.440.000 | 668.782.700 | 189,963% |
| 2019 | 1.226.833.682 | 707.984.500 | 173,285% |
| 2020 | 1.226.833.682 | 354.761.000 | 345,820% |
| 2021 | 1.285.152.264 | 227.660.000 | 564,505% |

Sumber : Data Diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 7 perhitungan rasio belanja desa per bidang Belanja Pelaksana Pembangunan Desa mengalami peningkatan mulai tahun 2020 sebesar 345,820% dan 2021 sebesar 564,505%. Peningkatan rasio ini dikarenakan menurunnya biaya pelaksanaan pembangunan desa yang disebabkan biaya diarahkan ke penanggulangan bencana penyakit covid19. Pemerintah Desa selama 2 tahun (2020 dan 2021) menghentikan sebagian pembangunan yang tidak optimal dalam kebutuhan masyarakat sehingga pembangunan desa di Desa Pematang Serai tidak mengalami perubahan dimasa Covid19, mereka lebih mengoptimalkan kesehatan masyarakat Desa Pematang Serai.

c. Belanja Pembinaan Kemasyarakatan

Hasil perhitungan Rasio Belanja Desa Per Bidang Belanja Pembinaan Kemasyarakatan adalah

Tabel 8 Perhitungan Rasio Belanja Desa Per Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

| Tahun | Belanja Desa | Belanja Pembinaan Kemasyarakatan | Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan |
|-------|---------------|----------------------------------|---|
| 2018 | 1.270.440.000 | 51.866.000 | 2449,466% |
| 2019 | 1.226.833.682 | 86.900.000 | 1411,776% |
| 2020 | 1.226.833.682 | 36.700.000 | 3342,871% |
| 2021 | 1.285.152.264 | 54.285.000 | 2367,417% |

Sumber : Data Diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 8 perhitungan rasio belanja desa per bidang belanja pembinaan kemasyarakatan selama 4 tahun dari tahun 2018 sampai 2021 mengalami fluktuasi yang disebabkan menurunnya aktivitas masyarakat atas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat yaitu membatasi ruang lingkup aktivitas di luar rumah. Jika dilihat belanja pembinaan kemasyarakatan tahun 2020 sebesar Rp. 36.700.000 dan 2021 sebesar Rp.54.285.000 masa covid19 menurun belanja pembinaan kemasyarakatan.

d. Belanja Pemberdayaan Masyarakat

Hasil perhitungan Rasio Belanja Desa Per Bidang Belanja Pemberdayaan Masyarakat adalah

Tabel 9 Perhitungan Rasio Belanja Desa Per Bidang Pemberdayaan Masyarakat

| Tahun | Belanja Desa | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat |
|-------|---------------|---------------------------------|--|
| 2018 | 1.270.440.000 | 99.331.000 | 1278,996% |
| 2019 | 1.226.833.682 | 63.107.000 | 1944,053% |
| 2020 | 1.226.833.682 | 172.150.000 | 712,654% |
| 2021 | 1.285.152.264 | 168.000.000 | 764,972% |

Sumber : Data Diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 9 perhitungan rasio belanja desa per bidang belanja pemberdayaan masyarakat bahwa ditahun 2020 sebesar 712,654% dan 2021 sebesar 764,972% mengalami penurunan dikarenakan meningkatnya belanja pemberdayaan masyarakat selama 2 tahun tersebut.

e. Belanja Penanggulangan Bencana

Hasil perhitungan Rasio Belanja Desa Per Bidang Belanja Penanggulangan Bencana adalah

Tabel 10. Perhitungan Rasio Belanja Desa Per

| Tahun | Belanja Desa | Belanja Penanggulangan Bencana | Belanja Bidang Penanggulangan Bencana |
|-------|---------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| 2018 | 1.270.440.000 | - | 0,000 |
| 2019 | 1.226.833.682 | - | 0,000 |
| 2020 | 1.226.833.682 | 283.524.000 | 432,709% |
| 2021 | 1.285.152.264 | 298.800.000 | 430,105% |

Bidang Penanggulangan Bencana

Sumber : Data Diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 10 perhitungan rasio belanja desa per bidang belanja penanggulangan bencana di tahun 2018 dan 2019 adalah 0, karena ditahun itu desa tidak mengalami bencana, tetapi ditahun 2020 sebesar 432,709% dan 2021 sebesar 430,105% mengalami bencana wabah penyakit yaitu Virus Covid19 sehingga terdapat biaya belanja penanggulangan bencana tahun 2020 sebesar 283.524.000 dan meningkat lagi ditahun 2021 sebesar Rp.298.800.000. Kondisi selama 2 tahun menunjukkan keadaan ekonomi masyarakat di desa pematang serai belum optimal dan disebabkan aktivitas ekonomi belum stabil.

7. Rasio Efisiensi Belanja Desa

Hasil perhitungan rasio efisiensi belanja desa adalah

Tabel 11. Perhitungan Rasio Efisiensi Belanja Desa

| Tahun | Realisasi Belanja Desa | Target Belanja Desa | Perhitungan Rasio Efisiensi Belanja Desa | | Kategori |
|-------|------------------------|---------------------|--|----------------|----------|
| 2018 | 1.270.440.000 | 1.219.370.000 | 104,188% | Tidak efisien | |
| 2019 | 1.226.833.682 | 1.261.432.500 | 97,257% | Kurang Efisien | |
| 2020 | 1.226.833.682 | 1.375.351.818 | 89,201% | Cukup Efisien | |
| 2021 | 1.285.152.264 | 1.286.236.664 | 99,916% | Kurang Efisien | |

Sumber : Data Diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 11 perhitungan rasio efisiensi belanja desa mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai 2021. Tahun 2018 rasio efisiensi belanja desa sebesar 104,188% dan dibandingkan standar berdasarkan permendagri No.690.900-327 tahun 1996 bahwa lebih dari 100% menunjukkan kriteria yang tidak efisien. Kemudian tahun 2019 sebesar 97,257% dan tahun 2021 sebesar 99,916% menunjukkan kriteria kurang efisien dan selanjutnya tahun 2020 sebesar 89,201% menunjukkan kriteria cukup efisien.

b. Hasil Uji Beda Pendekatan Rasio pada Analisis Pendapatan dan Belanja Desa sebelum dan masa pademik covi19

1. Hasil Uji Beda Pendekatan Rasio pada Analisis Pendapatan Desa sebelum dan masa pademik covi19

Berikut ini hasil statistik dengan menggunakan SPSS adalah

Tabel 12. Hasil Uji Beda Pendekatan Rasio pada Analisis Pendapatan Desa sebelum dan masa pademik covi19

Paired Samples Test

| | Paired Differences | | | | | t | df | Sig. (2-tailed) |
|----------------|--------------------|----------------|-----------------|---|--------|-----|-----|-----------------|
| | Mean | Std. Deviation | Std. Error Mean | 95% Confidence Interval of the Difference | | | | |
| | | | | Lower | Upper | | | |
| Pair 1 SC - MC | 166800 | 929768 | 294018 | -.498316 | 831916 | 567 | 584 | |

Sumber : Data Diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 12 menjelaskan nilai mean sebesar 0.166800 dan t sebesar 0.567 dan nilai sig(2-tailed) sebesar 0.584 yang artinya > $\alpha = 0.05$. Hal ini menunjukkan tidak terdapat perbedaan rasio keuangan desa pada analisis pendapatan desa sebelum dan masa pademik covid19.

2. Hasil Uji Beda Pendekatan Rasio pada Analisis Belanja sebelum dan masa pademik covi19

Berikut ini hasil statistik dengan menggunakan SPSS adalah

Tabel 13 Hasil Uji Beda Pendekatan Rasio pada Analisis Belanja Desa sebelum dan masa pademik covi19

Paired Samples Test

| | Paired Differences | | | | | t | df | Sig. (2-tailed) |
|----------------|--------------------|----------------|-----------------|---|------------|-------|----|-----------------|
| | Mean | Std. Deviation | Std. Error Mean | 95% Confidence Interval of the Difference | | | | |
| | | | | Lower | Upper | | | |
| Pair 1 SC - MC | 1.096667E2 | 591.273408 | 170.685930 | 485.343867 | 266.010533 | -.643 | 11 | .534 |

Sumber : Data Diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 13 menjelaskan nilai mean sebesar -

0,10966 dan t sebesar -0.643 dan nilai sig(2-tailed) sebesar 0.534 yang artinya $> \alpha = 0.05$. Hal ini menunjukkan tidak terdapat perbedaan rasio keuangan desa pada analisis belanja desa sebelum dan masa pademik covid19

2. Pembahasan

a. Kinerja keuangan desa melalui pendekatan rasio dengan analisis pendapatan sebelum dan masa pademik covi19 di Desa Pematang Serai Kabupaten Langkat.

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa sangat penting dilakukan pengawasan dengan cara menilai kinerja keuangan desa setiap setahun. Desa Pematang Serai merupakan desa yang berada dalam kabupaten langkat, dimana masyarakatnya memiliki usaha bertani, usaha kecil menengah seperti jualan keripik, jualan jajanan dan bengkel serta usaha lainnya. Kinerja keuangan desa dengan pendekatan analisis pendapatan di desa pematang serai dengan menggunakan 5 rasio yaitu derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan desa, analisis pertumbuhan pendapatan desa, rasio efisiensi pendapatan desa dan rasio efektivitas pendapatan desa. Derajat Desentralisasi menunjukkan kemampuan desa dalam merencanakan keuangan desa menuju dalam penyelenggaraan desentralisasi. Desa Pematang Serai dengan derajat desentralisasi selama 4 tahun mengalami peningkatan meskipun selama tahun 2020 dan 2021 merupakan masa desa terkena dampak wabah covid19. Derajat desentralisasi tahun 2019 sebesar 0.594% dan tahun 2020 sebesar 0.616%. Sehingga menyimpulkan bahwa pemerintah desa mulai mengola keuangan desa menjadi optimal demi

menuju desa mandiri dan lebih meningkatkan keuangan desa di tahun berikutnya.

Rasio Ketergantungan keuangan desa adalah desa yang masih tergantung kepada pemerintah pusat dalam membiayai operasional pemerintah desa seperti pendapatan transfer. Rasio ketergantungan keuangan desa di desa pematang serai selama 4 tahun menunjukkan bahwa desa masih ketergantungan dengan pemerintah pusat berupa pendapatan transfer yang selalu lebih besar dibandingkan pendapatan desa. Desa pematang serai belum optimal dalam pengelolaan keuangan desa sehingga pendapatan desa masih rendah dan mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat. Perlunya aparatur desa dapat mengajak masyarakat desa untuk menggali potensi desa yang ada di desa pematang serai dengan meningkatkan BUMDes tersebut. Analisa pertumbuhan pendapatan desa merupakan kemampuan desa dalam meningkatkan pendatan desanya setiap periode. Kondisi analisa pertumbuhan pendapatan desa di Desa pematang Serai sama dengan hasil penelitian Anugeraheni et al (2022), Marti Astuti et al(2021) dan Ramadhani et al (2019) perlu melakukan perencanaan dalam memaksimalkan pengelolaan sumber pendapatan desa setiap tahunnya seperti peningkatan pendapatan BUMDES.

Rasio Efektivitas Pendapatan Daerah di Desa Pematang Serai selama periode 2018 sampai 2021 mengalami kondisi yang efektif. Hasil penelitian ini sejalan dengan Anugerahi et AL (2022), Damayanti et al (2021) dan Ramadhani et al (2019) bahwa dengan meningkatkan pendapatan BUMDES dapat memberikan masukan dalam peningkatan pendapatan desa setiap tahun yang membuat kinerja keuangan desa menjadi optimal. Untuk Rasio Efisiensi Pendapatan daerah di desa pematang serai selama masuk covid19 mengalami kurang efisien dikarenakan

besarnya belanja desa dibandingkan pendapatan desa. Hasil penelitian ini sama dengan Anugeraheni et al (2022), Ramadhani et al (2019), Qodriyani (2017) dan Marti Astui et al (2021) bahwa pemerintah desa dalam pengalokasian dana desa yang belum tepat pada kegiatan yang menyebabkan terjadinya pemborosan pada anggaran sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan desa tahun berikutnya. Hasil penelitian ini bertentangan dengan Damayanti et al (2021) dan Sunarya et al (2017) dimana rasio efisiensi pendapatan desa dengan kondisi sangat efisien karena besarnya pendapatan desa dibandingkan belanja desa tersebut, ini disebabkan optimalnya pengelolaan dana desa yang dilakukan pemerintah desa dan masyarakatnya.

Kondisi pendapatan desa selama masa covid19 memang mengalami penurunan yang sangat dratis dikarenakan masih sebagian desa yang sangat berharap dengan pendapatan transfer hal ini yang membuat mereka tidak mau menggali potensi-potensi pendapatan yang ada di desa tersebut. Padahal desa tersebut memiliki potensi yang beragam berdasarkan letak geografis daerah desa masing-masing. Salah satu faktor terhambatnya dalam peningkatan pendapatan desa adalah lemahnya potensi Sumber Daya Manusia khususnya aparatur desa sehingga perlu dilakukan diklat dalam peningkatan Sumber Daya Manusia. Kemudian akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa ke masyarakat sehingga tidak terjadi evaluasi dalam memperbaiki perencanaan untuk peningkatan dana desa tersebut atau lambatnya aparatur desa dalam melaksanakan pengelolaan dana desa sangat mempengaruhi dalam kinerja keuangan desa. Salah satu contoh tidak optimalnya dalam pemungutan pendapatan asli desa dan rendahnya pengawasan pengelolaan pendapatan desa yang anggap remeh dalam

pencapaian target pendapatan asli desa tersebut. Pemerintah desa pematang serai harus lebih serius lagi dalam mengelola pendapatan desa yang berpotensi di desa seperti pengoptimalkan kembali BUMDES, pelaku UMKM – UMKM di desa dengan memberikan pelatihan dalam perencanaan keuangan usaha, penentuan harga jual, pembuatan laporan keuangan. Kemudian Mengaktifkan Wisata Goel dengan memperkenalkan kepada seluruh masyarakat di Sumatera Utara dan Diluar pulau Sumatera melalui Facebook dan Instragram bahwa Kabupaten Langkat memiliki desa wisata tradisional dengan makan seafood dan ikan secara terapung (Café terapung) yang terletak di Desa Pematang Serai, Kecamatan Tanjung Pura. Dengan banyaknya pengunjung berdatangan ke Desa Pematang Serai maka secara otomatis akan meningkatkan pendapatan BUMDES dan pelaku UMKM dan berdampak dalam peningkatan pendapatan desa.

Pendapatan desa sebelum dan masa pademik covid19 dengan uji statistik tidak terdapat perbedaan kondisi kinerja keuangan desa melalui rasio pendapatan. Hal ini menunjukkan pengelolaan dana desa sebelum dan masa covid19 belum optimal dalam memaksimalkan pengelolaan dana desa. Perlunya pemerintah desa untuk dapat meningkatkan perencanaan pendapatan desa dalam setiap tahunnya sekitar 70% dari tahun sebelumnya. Masih rendahnya potensi sumber daya manusia di desa pematang serai dalam menggali sumber-sumber pendapatan desa yang hanya di daerah kawasan lingkungan sekitar pemerintah kabupaten langkat. Peningkatan Pelaku UMKM dan Bumdes di Desa Pematang serai sangat penting dalam menunjang pengoptimalkan peningkatan pendapatan desa dan pemerintah desa pematang serai masih 100% tergantung dengan besarnya pendapatan transfer dari pemerintah

pusat dan provinsi. Hal ini yang menyebabkan mereka tidak bangkit dari kekreatifan masyarakat dan apartur pemerintah desa untuk membangun desanya. Pemikiran masyarakat dan Aparatur desa masih sangat tradisional saja, jadi sangat penting peningkatan mutu pendidikan formal dan informal bagi masyarakat dan aparatur desa untuk dapat lebih terinovasi dan sinergi menjadikan desa mandiri dan wisata.

b. Kinerja keuangan desa melalui pendekatan rasio dengan analisis belanja desa sebelum dan masa pademik covid19 di Desa Pematang Serai Kabupaten Langkat

Penggunaan belanja yang tepat sasaran akan berdampak pada pembangunan desa dan membuat lebih efisien pembiayaan belanja desa. Kinerja keuangan desa dengan pendekatan analisis belanja di desa pematang serai dengan menggunakan 6 rasio belanja yaitu rasio belanja desa bidang penyelenggara pemerintah desa, rasio belanja desa bidang pelaksana pembangunan desa, rasio belanja desa bidang pembinaan kemasyarakatan, rasio belanja desa bidang pemberdayaan masyarakat, rasio belanja desa bidang penanggulangan bencana dan rasio efisiensi belanja desa. Rasio belanja desa bidang penyelenggara pemerintah desa selama tahun 2018 sampai 2021 mengalami penurunan. Aktivitas belanja penyelenggaraan pemerintah desa banyak dialihkan ditahun 2020 dan 2021 untuk biaya perawatan kesehatan aparatur desa dan masyarakat desa pematang serai sehingga kegiatan penyelenggara pemerintah desa yang penting dilaksanakan seperti penyelenggaraan penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintah desa, administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan kegiatan desa, tata praja pemerintahan,

perencanaan, keuangan dan pelaporan serta pertanahan. Untuk kegiatan fasilitas prasarana dan sarana pemerintah desa selama tahun 2020 yang tidak mendesak di hentikan sementara.

Kemudian rasio belanja desa bidang pelaksana pembangunan desa selama tahun 2018 sampai 2021 mengalami peningkatan yang sangat tinggi sekita 60%. Aktivitas pelaksanaan pembangunan desa ini meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, kawasan permukiman, kehutanan dan lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, energi dan sumber daya mineral dan pariwisata. Belanja pelaksanaan pembangunan desa naik ditahun 2020 dan 2021 adalah aktivitas kesehatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa pematang serai. Karena tahun itu masyarakat membutuhkan vitamin, alat kesehatan dan lainnya dalam mempertahankan hidup dari virus covid19. Rasio belanja desa bidang pembinaan kemasyarakatan selama tahun 2018 sampai 2021 mengalami fluktuasi. Aktivitas belanja pembinaan kemasyarakatan adalah ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, kebudayaan dan keagamaan, kemudahan dan olah raga serta kelembagaan masyarakat. Dari beberapa aktivitas pembinaan kemasyarakatan desa pematang serai selamai tahun 2020 dan 2021 adalah belanja dalam perlindungan masyarakat dari wabah penyakit covid19.

Selanjutnya rasio belanja desa bidang pemberdayaan masyarakat selama tahun 2018 sampai 2021 mengalami penurunan. Jika dilihat aktivitas belanja pemberdayaan masyarakat adalah kelautan dan perikanan, pertanian dan peternakan, peningkatan kapasitas aparatur desa, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, koperasi, usaha mikro kecil dan

menengah, dukungan penanaman modal dan perdagangan dan perindustrian. Aktivitas belanja pemberdayaan masyarakat tahun 2020 dan 2021 berfokus dalam perlindungan anak dan keluarga. Sehingga masyarakat desa pematang serai sangat membutuhkan perlindungan dari pemerintah desa untuk dapat mengatasi ekonomi masyarakat. Aktivitas ekonomi di masa covid19 sudah menggunakan teknologi yang membutuhkan biaya dalam usaha mikro kecil dan menengah masyarakatnya. Rasio belanja desa bidang penanggulangan bencana di desa pematang serai hanya ada selama tahun 2020 dan 2021. Aktivitas belanja penanggulangan bencana yaitu penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak. Aktivitas penanggulangan bencana tersebut termasuk semua aktivitas sehingga belanja tersebut semakin meningkat di tahun 2021 karena mulai meningkat dan membahayakan covid19 tersebut seluruh dunia. Kemudian tahun 2021 pemerintah pusat mewajibkan masyarakat untuk vaksin agar dapat mengurangi resiko tingginya angka kematian masyarakat.

Rasio efisiensi belanja desa menggambarkan perbandingan besarnya jumlah realisasi belanja desa dengan anggaran belanja desa. Rasio efisiensi belanja desa di desa pematang serai selama tahun 2018 sampai 2021 memiliki kategori tidak efisien di tahun 2018 dan 2019 serta 2021 adalah kurang efisien, hanya tahun 2020 dengan kategori cukup efisien dengan posisi dibawah 90%. Penelitian ini tidak sejalan dengan Sunarya et al (2017) dengan belanja desa pada tingkat efisien di tingkat 99,15%, akan tetapi ada program pemerintah desa yang tidak dibiayai atau tidak direalisasi dengan faktor keterlambatan aparatur desa dalam pelaksanaan pengelolaan desa dan kegiatan perjalanan dinas pemdes Aeramo yang tidak dikuti disebabkan

padatnya jadwal pekerjaan RT/RW dalam penyelesaian tata ruang desa. Akan tetapi kondisi di pemerintah desa pematang serai sebelum covid19 belanja desa digunakan tidak sesuai dengan kondisi ketepatan dalam penggunaan anggaran sehingga terjadi pemborosan belanja dengan penilaian kategori tidak efisien. Kemudian dimasa covid19 belanja pemerintah banyak dialokasikan dalam belanja bidang kesehatan untuk perlindungan masyarakat desa pematang serai. Selama tahun 2020 dan 2021 pemerintah desa dalam mengalokasikan belanja desa belum optimal dalam pembangunan desa dan belanja desa tersebut belum berdampak dalam peningkatan investasi di desa pematang serai sehingga tidak dapat meningkatkan pendapatan asli desa. Pemerintah desa pematang serai harus lebih inovasi lagi untuk meningkatkan pendapatan asli desa yang berpotensi besar di desa tersebut agar desa tidak terlalu bergantung kepada pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Sehingga desa pematang serai dalam melakukan anggaran belanja tahun berikutnya dialokasikan untuk belanja pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pelaku UMKM masyarakat desa pematang serai dengan memberikan pelatihan memasarkan produk secara digital kedaerah-daerah di Indonesia dan negara tetangga. Kemudian analisis belanja desa sebelum dan masa pademik covid19 berdasarkan statistik tidak terdapat perbedaan kondisi kinerja keuangan desa melalui rasio belanja desa. Hal ini disebabkan alokasi belanja desa banyak dalam kegiatan yang tidak berpotensi dalam peningkatan pendapatan asli desa dan ditahun 2020 dan 2021 alokasi belanja desa diarahkan hampir dalam perlindungan masyarakat, belanja bidang kesehatan dan belanja penanggulangan bencana wabah covid19 untuk masyarakat desa pematang serai. Aktivitas dari masing-masing bidang

belanja desa pergerakan yang tetap dalam belanja pegawai desa dan belanja dalam mengatasi wabah penyakit covid19, bukan belanja yang pergerakannya untuk meningkatkan pelaku UMKM dengan pemberdayaan masyarakat, pemungutan retribusi dan pajak daerah di desa pematang serai. Belanja desa belum optimal dapat meningkatkan pendapatan asli desa sebesar 60% dari pendapatan transfer pemerintah pusat, akan tetapi pendapatan asli desa selama 4 tahun yaitu 2018 samapai 2021 lebih kurang sebesar 0,6% dari pendapatan transfer. Sehingga sangat diperlukan strategi-startegi pemerintah desa pematang serai lebih inovasi dan kreatif dalam alokasi belanja desa untuk tahun anggaran tahun berikutnya.

SIMPULAN

Kinerja Keuangan desa melalui pendekatan rasio dengan analisis pendapatan desa dan belanja desa. Hasil rasio-rasio di analisis pendapatan desa dibandingkan dengan penilaian permendagri tahun 1996. Analisis pendapatan menggunakan 5 rasio yaitu Derajat Desentralisasi mengalami peningkatan yang hanya 10% dari tahun sebelumnya dan rasio ketergantungan keuangan desa di desa pematang serai sangat tinggi. Kemudian analisis pertumbuhan pendapatan desa masih menurun selama 2019 sampai 2021 sedangkan rasio efisiensi pendapatan desa dengan kondisi kurang efisien dan rasio efektivitas pendaptan desa mengalami kondisi yang efektif. Pemerintah desa melakukan perencanaan dan pengawasan dalam pemungutan retribusi dan pajak daerah di desa pematang serai untuk dapat meningkatkan realisasi pendapatan asli desa dengan target besarnya pendapatan desa 60% lebih besar pendapatan transfer pemerintah pusat dengan melakukan pelatihan pelaku UMKM dan BUMDES dalam mengelola usaha mereka dalam memperoleh

keuntungan. Analisis belanja desa menggunakan 6 rasio yaitu rasio belanja desa bidang penyelenggara pemerintah desa, bidang pelaksana pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang penanggulangan bencana dalam kondisi perkembangan yang fluktuasi setiap tahunnya dan rasio efisiensi belanja desa ditahun 2018 tidak efisien, tahun 2019 dan 2021 kurang efisien dan tahun 2020 cukup efisien. Pemerintah desa lebih efisien dalam pengalokasian belanja desa yang tepat sasaran agar tidak terjadi pemborosan belanja. Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan desa melalui pendekatan rasio dengan analisis pendapatan desa dan belanja desa sebelum dan masa pademik covi19 di Desa Pematang Serai Kabupaten Langkat. Pemerintah desa lebih optimal melakukan pergerakan belanja desa seperti menciptakan investasi baru (pembangunan sarana dan praasarana) yang berdampak dalam peningkatan pendapatan asli desa di desa pematang serai. Signaling akan memperbaiki hasil laporan realisasi pendapatan dan belanja desa melalui evaluasi kinerja keuangan desa.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih kepada Bapak Rektor Universitas Pembangunan Pancabudi yang telah memberikan bantuan hibah internal penelitian yang penulis lakukan. Semoga Hasil Penelitian ini dapat berkontribusi bagi Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat dan Para Peneliti yang membutuhkan hasil review yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

Anugeraheni, Ni Kadek Diksi Dan Yuniarta, Gede Adi.(2022). Analisis Kinerja Keuangan Desa Dengan Menggunakan Rasio Keuangan Daerah Pada Pemerintah Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, KABUPATEN

BULELENG TAHUN 2015 – 2019 .Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi. Universitas Pendidikan Ganesha, Vol :13 No : 2. Singaraja. Bali.

Bastian, Indra. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi ketiga, Yogyakarta: ANDI

Badan Pusat Statistik. *Statistik Keuangan Pemerintah Desa Tahun 20018-2021*, Jakarta. Badan Pusat Statistik.

Damayanti. Ade, Suriyanto, Sarong. Sumarni Dan R.Baso. (2021). Analisis Pengelolaan Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Desa (Studi Pada Desa Bontomanai Kabupaten Gowa). *Jurnal Ilmiah Ecosystem* Volume 21 Nomor 3, Hal. 654-666, September - Desember 202.

Irma. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. *Jurnal Katalogis*, (Online), Vol, 3. No. 1. (<http://jurnal.untad.ac.id>, diakses 10 April 2020)

Mahmudi. (2009). *Analisis Laporan keuangan Pemerintah Daerah-Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Mardiasmo.(2007), *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta:ANDI

Martiasuti. Hafsyah Intan, Nugroho.Agus dan Widyawati. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian* E-ISSN: 2614-6053 P-ISSN: 2615-2878 Volume 6, Nomor 2, Mei 2021 www.jim.unsyiah.ac.id/JFP

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Qodriyani. Asri Laela, Sumandar dan H. Ririh Sri (2017). Analisis Efisiensi Penggunaan Dana Desa Pada Pemerintah Desa (Studi kasus Desa Bogares Kidul, Kec.Pangkah Kab Tegal). Politeknik Harapan Bersama.

Ramadhani Et Al. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja APBdesa. (Studi Kasus Desa Bulak Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan). *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*.Vol. 17 No. 1.

Syah. Firman, Aulia dan Hididayat. M (2021). Analisis Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Kasus Pada Kantor Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong). *Jurnal Economix* Volume 9 Nomor 1 Juni 2021.

Sunarya. Herni dan Lamaya. Fauziah (2017). Analisis Kinerja Keuangan Desa Dengan Pendekatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 Di Desa Aeramo Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo NTT. *Jurnal Akuntansi*. Volume 4. No.3.

Ulum, Ihyahul. (2009). *Audit Sektor Publik*, Jakarta: PT Bumi Aksara.